

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EFEKTIVITAS BANTUAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT
DI KOTA BANDUNG

(Kantor Litbang dengan LPM-UPI)
Tahun 2003

A. Latar belakang

Kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam kerangka penanggulangan kemiskinan di kota Bandung dapat dikelompokkan ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum terjadinya krisis ekonomi (tahun 1998) dan periode setelah tahun 1998. Periode sebelum tahun 1998 dimulai secara terprogram sejak tahun 1992 / 1993. Pada periode ini ditandai dengan adanya Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang penanggulangan kemiskinan di daerah IDT dan Inpres No. 3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan keluarga yang sarasannya diprioritaskan kepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Pada periode ini Pemkot Bandung mengemasnya dalam suatu kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bandung dengan maksud terhapusnya penduduk miskin dan keluarga tertinggal yang ditandai dengan terbebaskannya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera lalsan ekonomi pada akhir tahun 2000 / 2001. Program ini sarasannya adalah : Penduduk miskin, keluarga tertinggal, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Implementasi progam-program bantuan dana bergulir tersebut di atas berdasarkan laporan dari lembaga terkait dalam hal penyaluran dana menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Artinya dana-dana itu dapat diserap oleh masyarakat mencapai 100 %. Namun bagaiman dana itu dikelola oleh masyarakat dan sejauhmana dampaknya dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat masih belum dapat diketahui secara akurat dan komprehensif. Hal menonjol yang muncul dari program dana bergulir itu adalah justru berbagai masalah, kendala, penyimpangan, kemacetan dan ketidakefektivan. Oleh karena itu perlu adanya suatu kajian yang mendalam yang dilakukan secara menyeluruh, terprogram bertahapdan terus-menerus terutama oleh Pemkot Bandung. Perlu terprogram, karena program bantuan dana bergulir itu dilakukan dengan dana-danapemerintah, dan perlu bertahap, karena program itu jumlahnya cukup banyak yang sulit dilakukan dalam satu waktu. Oleh karena itu pada tahap sekarang ini pengkajian akan difokuskan pada P2KP, PDM-DKE, dan Program Barokah - GMT.

B. Permasalahan

1. Apakah penyaluran dana sesuai dengan tujuan, target, dan sasran program bantuan dana bergulir ?
2. Apakah dana yang ada pada kelompok masyarakat sudah dikelola sesuai dengan prinsip, tujuan & rencana penggunaan program bantuan dana bergulir ?
3. Sejauhmana optimalisasi fungsi institusi pengelola langsung seperti TPKd/k (organisasi pengganti), Tim Teknis, BKM, UPK, KSM, sarjana pendamping dalam pembinaan dan penyaluran dana bergulir.
4. Sejauhmana dampak program bantuan dana bergulir dalam :
 - a. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat;
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - c. Mengembangkan usaha

5. Masalah dan kendala apa saja yang muncul dan dihadapi baik dalam implementasi manajemen pembinaan dan penyaluran maupun dalam pengelolaan dana oleh kelompok masyarakat.

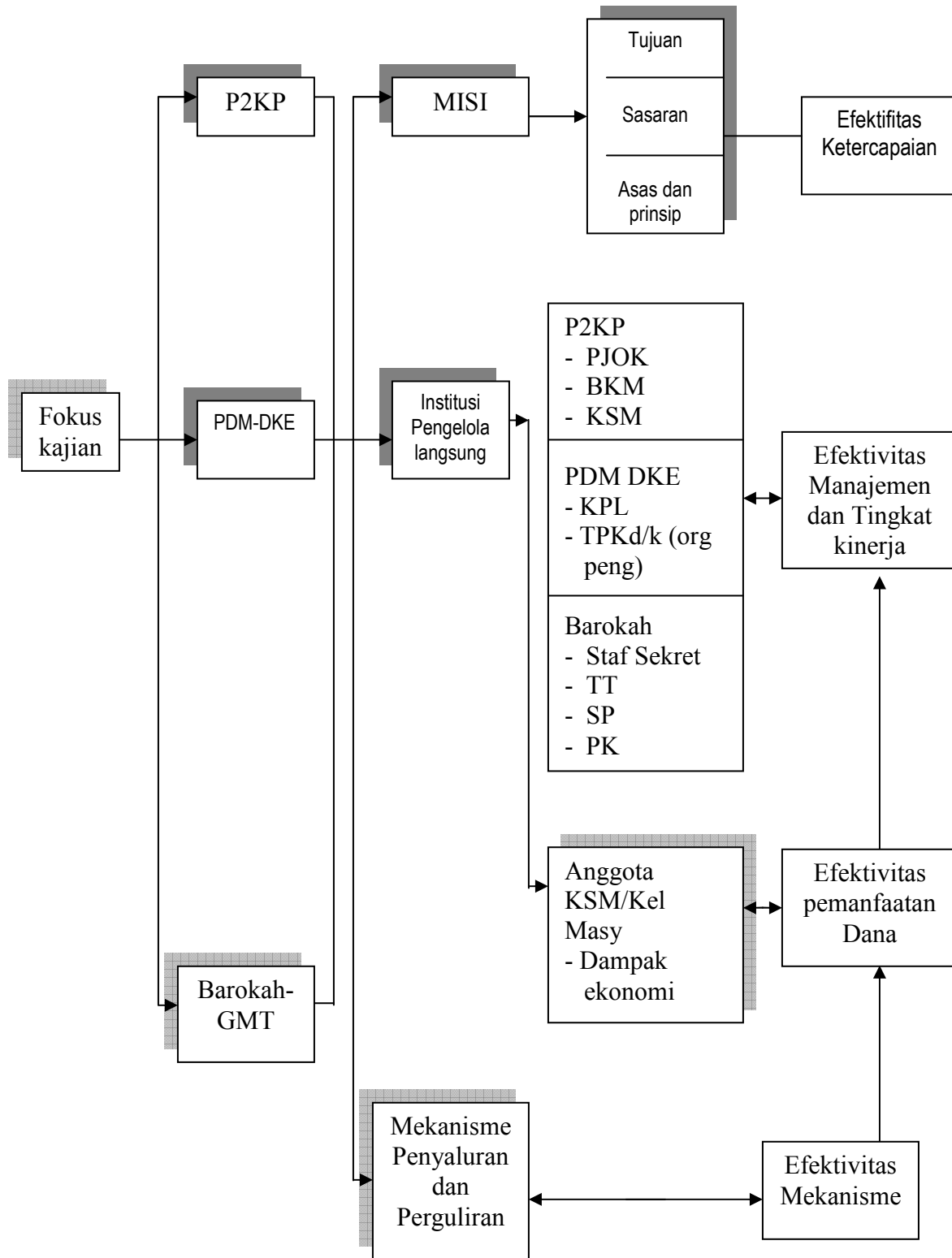
C. Tujuan

1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana dilihat dari tujuan, target dan sasaran program bantuan dana bergulir pada P2KP, PDM-DKE, dan Barokah-GMT
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan oleh institusi pengelola langsung bantuan dana bergulir pada P2KP, PDM-DKE, dan Barokah-GMT
3. Untuk memperoleh gambaran efektivitas penyaluran dan perguliran program bantuan dana bergulir pada P2KP, PDM-DKE, dan Barokah-GMT
4. Untuk memperoleh gambaran efektivitas dampak program P2KP, PDM-DKE, dan Barokah-GMT terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, dan mengembangkan usaha.

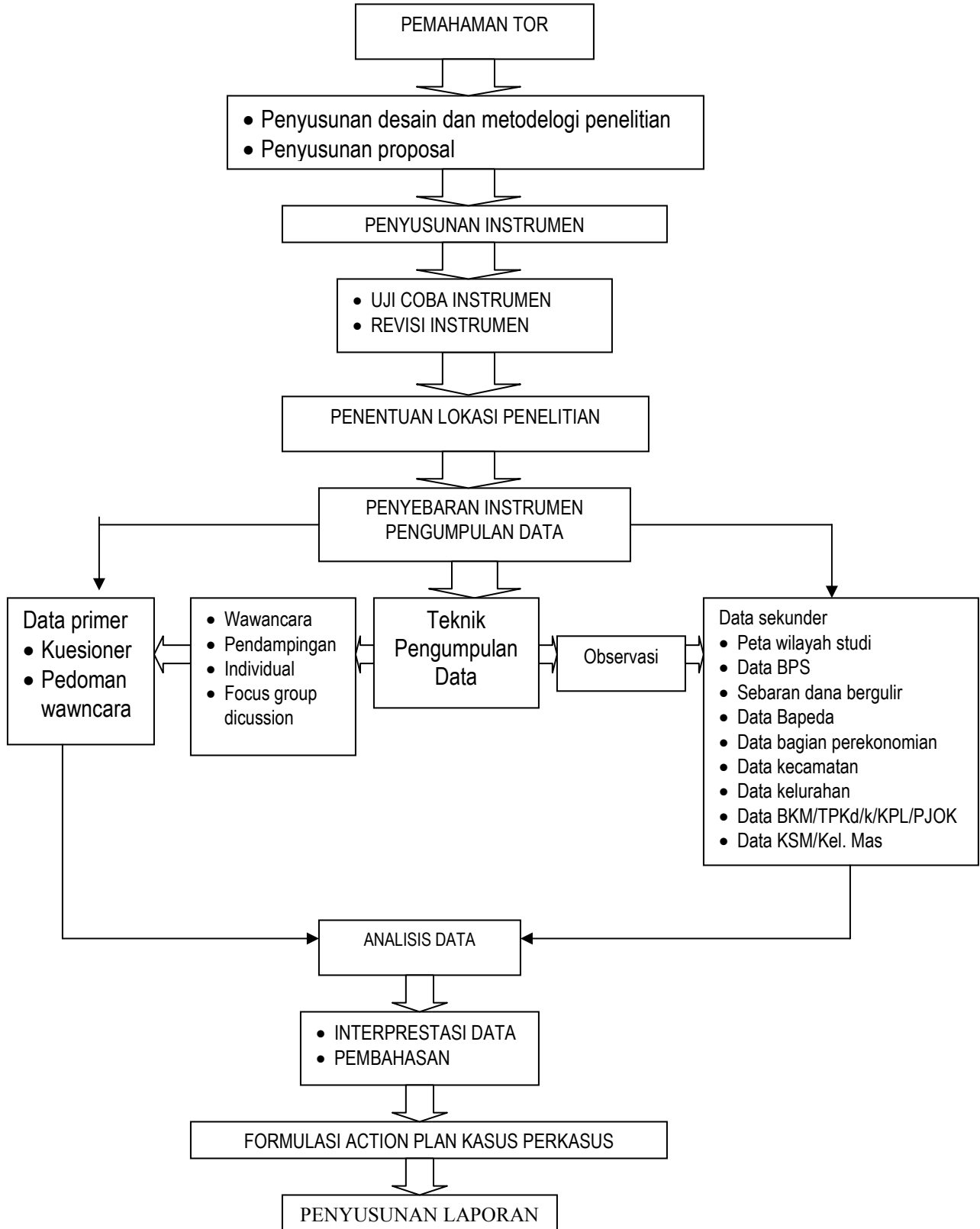
D. Manfaat dan Kegunaan

1. Memperbaiki mekanisme penyaluran dan perguliran dana yang dianggap berbelit-belit, tidak efisien dan membuka peluang untuk terjadinya kebocoran dan ketidaktepatan sasaran.
2. Kemungkinan disusunnya model penyaluran dan perguliran dana yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan masyarakat kota Bandung sehingga dapat mencapai tujuan dan target seoptimal mungkin.
3. Sebagai dasar untuk melahirkan kebijakan Pemkot Bandung dalam menghentikan atau meningkatkan jumlah dana bergulir atau mengembangkan berbagai jenis program bantuan dana bergulir bagi masyarakat Kota Bandung.
4. Sebagai dasar untuk memantapkan kebijakan Pemkot Bandung, apakah program bantuan dana bergulir ini dapat dijadikan sebagai salah satu kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat kota Bandung.

E. Alur Pikir Penelitian



F. Diagram Alur Penelitian



F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian evaluasi (Evaluation Research). Menurut Singarimbun dan Effendi (1987 : 5 – 6) penelitian evaluasi semakin dikenal dewasa ini karena berbagai program dalam masyarakat perlu diketahui manfaat dan efektivitasnya. Penelitian evaluasi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis seperti a). apa yang merupakan masalah pokok dari suatu masyarakat, b). program apa yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah itu, c). bagaimana program itu dapat dilaksanakan, d). apakah program dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan apakah tujuannya tercapai. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian evaluasi adalah seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai.

Untuk mencapai tujuan penelitian evaluasi digunakan metode penelitian survai, metode survai berupaya menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi (Rusidi, 1996 : 3) dengan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi dari variabel yang diteliti (Kerlinger, 1992 : 660) adakalanya survai seperti ini disebut survai deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sebab-sebab serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1985 : 63).

H. Ruang Lingkup Kajian

1. Prinsip, tujuan, target, sasaran dan alur manajemen pengelolaan dari setiap program bantuan dana bergulir pada P2KP, PDM-DKE, dan Barokah-GMT.
2. Efektivitas implementasi manajemen pengelolaan yang menyangkut optimalisasi fungsi institusi pengelola langsung seperti TPKd/k (organisasi pengganti), tim teknis, BKM, KSM, anggota KSM, sarjana pendamping, dan kelompok masyarakat penerima bantuan.
3. Efektivitas implementasi program dalam penyaluran dana, menentukan sasaran utama, pemanfaatan dan perguliran dana.
4. Efektivitas dampak program terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan dan mengembangkan usaha masyarakat.

I. Fokus Penelitian

Penelitian ini berupa kajian efektivitas program bantuan dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat Kota Bandung. Cukup banyak program bantuan dana bergulir yang sudah dijalankan baik dari pemerintah pusat sebagai Program Jaringan Pengaman Sosial seperti antara lain PDMDKE dan P2KP maupun program yang khusus dikembangkan oleh pemerintah Kota Bandung sendiri sebagai program pengentasan kemiskinan masyarakat Kota Bandung

Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan dari aspek : waktu, finansial, luas wilayah, persebaran masyarakat, keberlangsungan program bantuan dana bergulir yang ada, tujuan dan target yang ingin dicapai dari kajian ini, maka program bantuan dana bergulir yang akan dikaji difokuskan kepada : P2KP, PDM-DKE, dan Barokah-GMT.

J. Penetapan Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian menggambarkan bagian yang representatif dari enam eks wilayah pembangunan Kota Bandung, yaitu eks wilayah Cibeunying, eks wilayah Tegallea, eks wilayah Karees, eks wilayah Ujungberung dan eks wilayah Gedebage.

2. Setiap eks wilayah minimal ditentukan dua kecamatan, dan dari setiap kecamatan itu ditentukan tiga kelurahan yang menggambarkan institusi pengelola yang dianggap berhasil, sedang, dan kurang berhasil/gagal. Kemudian dari setiap institusi pengelola ditentukan beberapa kelompok masyarakat dengan klasifikasi yang maju, sedang, dan yang bangkrut.

K. Kesimpulan

1. Sasaran akhir program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui P2KP, PDM-DKE, dan Barokah GMT adalah meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan, selain dapat menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian modal usaha dana bergulir. Program ini berjalan sudah cukup lama dan belum dilakukan evaluasi sampai sejauhmana tingkat efektivitas program tersebut dampaknya dirasakan masyarakat.
2. Program P2KP, PDM-DKE, dan BAROKAH-GMT dirasakan oleh khalayak sasaran dengan sejumlah perubahan diantaranya yang terlihat pada aspek kemampuan ekonomi dan usaha masyarakat karena mendapatkan pasokan bantuan dana untuk modal usaha, perjalanan ini tidak begitu lama dirasakan oleh sekelompok masyarakat karena perjalanan waktu konsultan pendamping dilapangan terbatas berkisar 7 – 9 bulan. Konsultan pendamping habis masa tugasnya di lapangan tidak ada kader yang mampu dan bisa melanjutkan untuk mendampingi POKMAS/KSM/TPKd/k dan BKM di lapangan.
3. Kecepatan dan keakuratan usulan program kegiatan pada setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi awal dan intensitas layanan konsultasi dari aparat pemerintah dan konsultan kurang optimal. Hal ini terjadi di lapangan karena mekanisme perangkuman aspirasi dan validitas musyawarah desa belum aspiratif dalam mengembangkan program dan kebutuhan masyarakat, selain itu kemampuan TPKD, BKM, Fasilitator Kecamatan/ Desa/ Kelurahan, Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL), dan PJOK kurang profesional khususnya pada tingkat pemahaman dan penguasaan materi modul dan teknis operasional di lapangan. Dilihat dari kualitas dan intensitas perannya masih kurang memadai. Akibat dari hal tersebut berdampak pada kurang meningkatnya jumlah usaha produktif, pembukaan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja, pengurangan jumlah penganggur, peningkatan kegiatan ekonomi usaha kecil, dan kurang dirasakan penyerapan dana oleh sebagian besar masyarakat.
4. Variasi mekanisme penyaluran dana dan waktu pelaksanaan pada setiap Kecamatan/Desa/kelurahan beragam sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, kemampuan dan interest pengurus, intensitas layanan konsultasi dan tingkat kejelasan mekanisme perguliran dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diharapkan oleh para pengurus TPKd/k maupun BKM. Sistem perguliran dana modal kerja dipengaruhi oleh kesiapan dan kesehatan kelembagaan ekonomi desa yang ada, aspirasi masyarakat, arah kebijakan pemerintah/Pembina sebagai pendukung/fasilitator dan motivator bagi masyarakatnya, selain tingkat kejelasan mekanisme perguliran dana dan tingkat kesadaran atau komitmen masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap modal kerja bergulir. Ada beberapa kalangan pejabat Klurahan/Desa/Kecamatan yang kurang paham terhadap mekanisme Program bantuan dana bergulir masih nampak punya sikap menerabas menganggap mudah, cepat tapi salah dan sikap kurang tanggap terhadap daya dukung program karena merasa tidak terlibat penuh dalam kegiatan. Sekaligus intervensi elit Desa/Kelurahan cukup

dominant dan ini berdampak pada demokratisasi, dinamisasi masyarakat papan bawah di Desa. Ada kecenderungan berkembang sentiment negative dan sikap curiga beberapa perangkat dan elit Desa /Kelurahan kepada TPKD – BKM sebab pengelolaan tahun lalu terkesan tidak ada pertanggung jawaban program kegiatan selain tidak ada sanksi yang jelas bagi pengurus dan anggota peminjam yang menyalah gunakan wewenang.

5. Ada beberapa kasus yang dinilai kurang tepat pada saat khalayak sasaran memperoleh bantuan modal kerja bergulir artinya kurang tepat sasaran, penggunaan dana untuk usaha produktif dipergunakan untuk kepentingan konsumtif. Masih ada anggapan atau persepsi yang kuat dari kalangan masyarakat mengenai penafsiran yang keliru tentang program PDM-DKE atau P2KP maupun Barokah GMT, dana bantuan dianggap dana hibah yaitu pemberian dari pemerintah kepada rakyat miskin yang tidak perlu dikembalikan lagi. Persepsi masyarakat mengacu pada pengalaman program beberapa tahun yang lalu tidak pernah diminta pertanggungjawabannya oleh siapa pun juga. Di sini tempatnya bagaimana memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program seperti tersebut di atas dengan melihat pengalaman truma masa lalu yang cukup menantang bagi pengurus di lapangan. Pelaksanaan program PDM-DKE atau P2KP dan Barokah GMT pada umumnya cukup ideal karena pelaksanaannya menggunakan azas keadilan, keseimbangan, keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas yang cukup realistic. Namun implementasi di lapangan prinsip-prinsip tersebut tidak maksimal diterapkannya kepada khalayak sasaran.
6. Merencanakan program dalam kegiatan PDM-DKE, P2KP dan Barokah GMT, sangat sporadis dan parsial kurang mencerminkan kebutuhan berdasarkan hasil analisis identifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang muncul bukan kebutuhan masyarakat, yang nampak adalah kebutuhan terduga saja yang diprediksikan oleh aparat dan elit desa. Termasuk dalam menetapkan kelompok masyarakat yang harus mendapat bantuan modal bergulir diragukan tingkat obyektifitasnya dalam pemilihan calon yang akan mendapat bantuan modal tersebut. Tatacara penyampaian bantuan modal usaha jarang melibatkan RT/RW dan pihak Kelurahan untuk menyaksikan bahwa pinjaman ini betul-betul harus dikembalikan lagi. Sangat tepat sekali ada ijab kabul di antara kedua belah pihak yang saling percaya bahwa dana pinjaman ini adalah dana amanat yang harus dibrikan kembali secara estapet kepada peminjam berikutnya. Peran BKM/TPKd, dan Barokah semestinya dalam hal menyusun laporan keuangan, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan mempertanggungjawabkan perguliran dana, serta menyelesaikan masalah pengaduan, membina usaha POKMAS, memberikan sanksi masih termasuk kategori rendah belum dirasakan secara optimal oleh kelompok/khalayak sasaran.
7. Sosialisasi awal pembentukan pengurus di tingkat kelurahan / desa waktunya amat terbatas, padahal sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan program, karenanya memerlukan perhatian lebih serius dalam persiapan dan pelaksanaannya. Yang menjadi persoalan adalah tugas Konsultan, Fasilitator Kecamatan, BKM, TPKd/k, dibatasi oleh kontrakhanya 4-6 bulan dilapangan, sementara pembinaan dan pendampingan dilapangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk berdsarkan musyawarah di Kelurahan. Kemudian masalah lainnya adalah kesiapan, keterampilan dan kemampuan berorganisasi secara professional perlu pembinaan dan pendampingan secara khusus dan kontiniu oleh tim independen yang ada di Kelurahan. Sosialisasi awal pembentukan pengurus

ditingkat Kelurahan amat menentukan terhadap suksesnya program di lapangan, sebaliknya apabila sosialisasi kurang akomodatif dan aspiratif berdampak negatif terhadap jalannya program di lapangan. Apalagi keterlibatan RT/RW/Tokoh masyarakat, Pemuda, Wanita aparat kelurahan dalam proses pembentukan Pengurus di tingkat Kelurahan tidak representatif akan menjadi persoalan yang prinsip.

8. Pengaruh yang masih nampak terlihat di lapangan adalah factor social budaya yang terwujud pada kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif pada seluruh tahapan kegiatan mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian, dan pemeliharaan. Sedangkan faktor teknis organisasional meliputi kemampuan manajerial dan teknis, tingkat kerumitan prosedur dan mekanisme teknis operasional. Sedangkan faktor non-teknis seperti sistem penghargaan kepada kelurahan yang sukses belum terlihat, selain sistem penetapan, pemilihan pemegang peran dan sikap mental pemegang peran yang belum kondusif.
9. kinerja TPKd/k atau BKM dan Pengurus Barokah GMT merupakan factor kunci dalam program seperti ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengaktualisasikan peran mereka. Karena itu penetapan, Pemilihan pemegang peran serta pembekalan keterampilan manajerial teknis merupakan dua hal yang perlu diperhatikan. Data lapangan memberikan gambaran secara umum bahwa pelayanan kepada khalayak sasaran belum optimal, selain kesungguhan pengurus dalam bekerja, tanggungjawab, kemampuan, keterbukaan, kerjasama, kualitas laporan keuangan dan peningkatan modal kerja merupakan modal dasar dalam kinerja pengurus yang selama ini belum menjadi prioritas perhatian pengurus.
10. Kegiatan usaha kelompok masyarakat dalam hal penggunaan dana bagi usaha produktif berjalan sementara waktu, masih belum mampu mengembangkan dan meningkatkan usaha yang ditekuninya untuk jangka panjang, apalagi sampai mengatasi kendala serta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, data lapangan menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan.
11. Mekanisme penyaluran dan perguliran dana seperti dalam syarat-syarat untuk memperoleh dana pinjaman bergulir, sebagian kelompok masyarakat belum memahami cara-cara untuk mendapatkan pinjaman karena peran pengurus belum optimal dalam memberikan penyuluhan kepada khalayak sasaran penerima. Lebih rumit lagi ketika pengurus perlu melakukan uji petik ke lapangan untuk melihat sejauhmana usaha kecil yang mendapat bantuan modal kerja bergulir keberadaannya. Dalam tahap ini kemampuan dan keahlian pengurus dinilai masyarakat kurang memadai semuanya ini berdampak pada pengembalian pinjaman anggota. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk daya dukung pada administrasi pembukuan keuangan yang dilakukan belum tertib, rapih dan benar. Pada kegiatan ini dianggap penting aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan apakah KPL atau PJOK belum maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk mambantu kelancaran pengurus di tingkat Kelurahan/Desa.

L. Rekomendasi Antisipatif

1. Adanya pembinaan dan pendampingan yang kontiniu untuk kesuksesan program oleh LSM / Konsultan pendamping secara professional. Dengan harapan agar tidak ada keberpihakan dalam mencapai kesuksesan program, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat tercapai. Ada kejenuhan dan ketidak

percayaan dari masyarakat terhadap pemerintah ketika turun ke lapangan kurang direspon. Pihak swasta atau kalangan perguruan tinggi jadi mitra pemerintah dan mitra masyarakat agar mereka bangkit dan menyadari untuk hidup mandiri.

2. Barokah GMT, P2KP dan PDM-DKE atau yang sejenisnya perlu dilanjutkan, apabila dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Karena program ini secara global membantu kelompok masyarakat miskin yang terpuruk karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan maka penetapan lembaga pelestari dana perlu memperhatikan aspirasi dan potensi social budaya setempat serta mekanisme pengawasannya terutama melalui peran organisasi masyarakat fungsional yang ada di desa/kelurahan.
3. Kriteria pengurus dipilih berdasarkan prinsip DOUM (dari, oleh, dan untuk masyarakat) melalui pendekatan musyawarah dan kesepakatan di tingkat Kelurahan. Pengurus tidak diambil dari aparat pemerintahan kelurahan atau bukan staf kelurahan/LKMD, dan harus orang yang memiliki kemampuan waktu yang memadai, keterampilan yang relevan, jujur dan punya kredibilitas tinggi, selain jujur dan motivasi tinggi untuk mengabdikan diriditengah-tengah masyarakat.
4. Sosialisasi program dana bergulir hendaknya ditingkatkan, tujuannya agar masyarakat dan pengelola program dapat benar-benar mengerti dan memahami program dana bergulir. Isu hibah yang selama ini menjadi rintangan dapat dinetralisir dengan baik. Masyarakat yang tidak mengetahui dan membutuhkan modal tambahan dapat meminjam dengan prosedur yang jelas, tidak untuk sekelompok orang tertentu saja. Apabila masyarakat sudah dapat mengerti semua program dana bergulir yang ada di wilayahnya mereka dapat juga dijadikan alat control. Para pengelola akan termotivasi untuk dapat mengelola program dengan baik, pengelola akan sadar bahwa dana yang mereka pegang adalah milik masyarakat dan untuk masyarakat.
5. Pada prinsipnya dana program PDM-DKE, P2KP dan Barokah GMT adalah dana milik masyarakat yang harus bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang miskin di kelurahan, namun kenyataan di lapangan perguliran dana diberikan kepada sekelompok orang yang mampu dan punya lapangan usaha sebagaimana layaknya anggota masyarakat yang berpotensi terhadap peluang usaha di masyarakat.
6. Forum Lintas Pelaku (FLP) dibentuk di tingkat pusat dan kabupaten/kota untuk memantau dan memberikan masukan kepada organisasi pengelola program. Seharusnya FLP lahir dari keinginan masyarakat untuk kebersamaan dan solidaritas antar kelompok antar Kelurahan, sehingga bisa tukar pengalaman, wawasan di antara BKM/TPKd/k di masing-masing wilayahnya.
7. Kinerja dan target penyelesaian pengaduan harus ada kesepakatan antara anggota, pengurus dan aparat pemerintah terhadap kelompok sasaran yang melakukan pelanggaran, aturan sanksi seringkali tidak dituangkan dalam peraturan yang jelas, sistematis, berencana dan bertujuan. Sebagai komitmen bersama antar pengurus dan anggota yang harus dipahami bersama. Prediksi kedepan perlu ada peningkatan kinerja yang lebih efektif, karena selama ini kinerja belum berjalan optimal.
8. Rekrutmen anggota kelompok sebagai khalayak sasaran yang memanfaatkan bantuan modal kerja bergulir belum transparansi masih ada sebagian kecil pengurus BKM – PDMDKE dan Barokah GMT yang direkrut para anggotanya kurang layak sebagai peminjam modal usaha. Padahal banyak masyarakat

miskin yang memenuhi syarat sebagai anggota untuk diprioritaskan dapat bantuan modal kerja bergulir.

9. Sebelum menentukan program untuk pemberdayaan masyarakat hendaknya melakukan analisis kebutuhan atau identifikasi kebutuhan masyarakat. Masyarakat melihat bahwa program yang kini berjalan bukan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat melainkan hasil analisis sementara pemerintah ditingkat kelurahan.
10. Kelompok sasaran program bantuan dana bergulir harus dibedakan secara tegas, yaitu masyarakat miskin yang betul-betul miskin tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya atau belum pernah usaha serta masyarakat miskin yang memiliki usaha atau mata pencaharian relative tetap. Mengelola kedua kelompok sasaran itu harus berbeda satu sama lain.
11. Perlu dirumuskan suatu model penyaluran dan perguliran dana yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah dirumuskan peneliti.
12. Perlu dirancang manajemen organisasi yang mengelola dana bergulir yang melibatkan unsur aparatur kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat luas secara sinergis (lihat lampiran).
13. Perlu dirancang pengelolaan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di lingkungan kelurahan melalui peningkatan kesempatan kerja bagi penganggur pada setiap kelurahan.

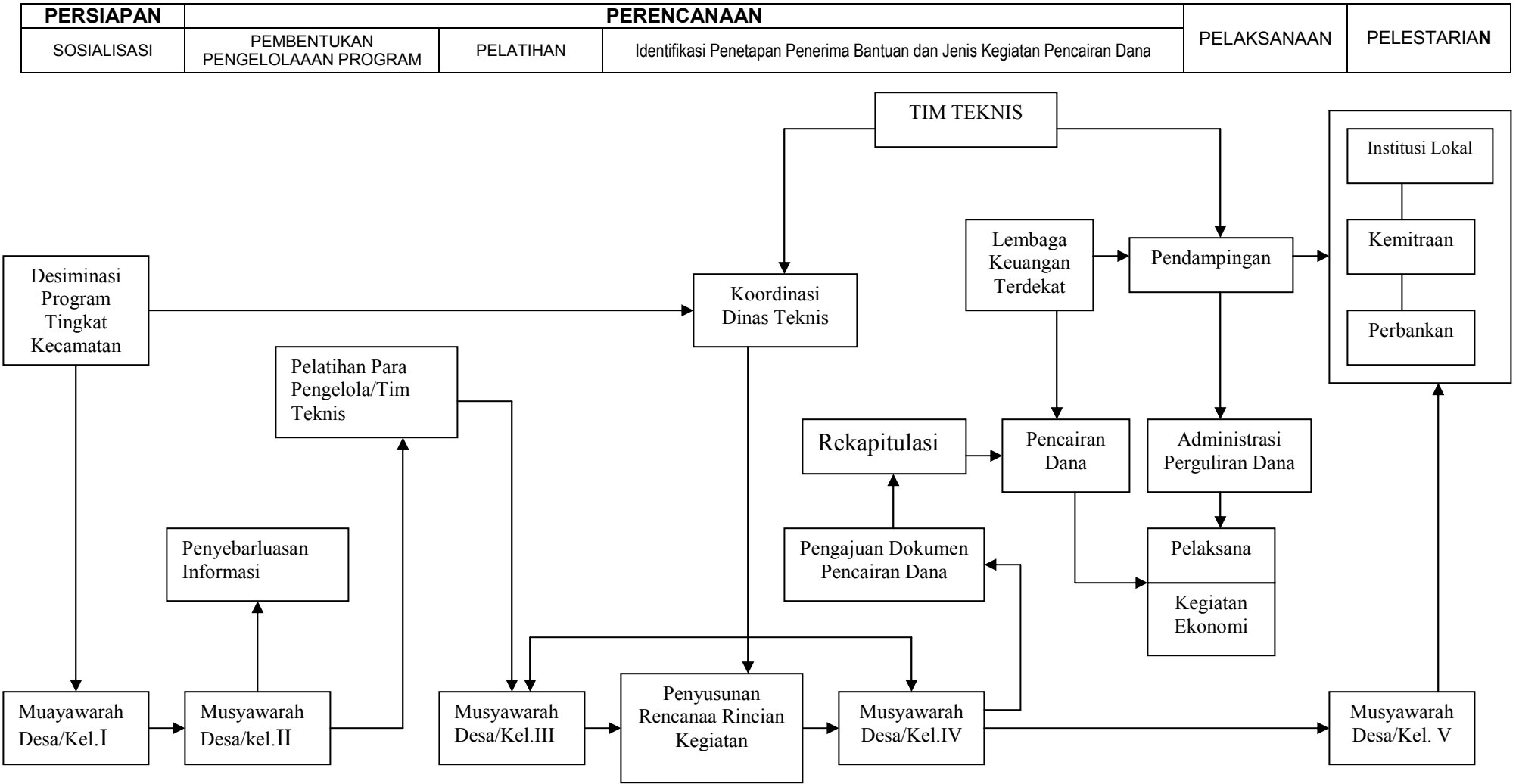
M. Rekomendasi Solusi

Rekomendasi solusi merupakan hasil temuan yang dapat dijadikan solusi atau model lain atas dasar analisis presentase, SWOT, kualitatif dan rekomendasi yang sifatnya antisipatif. Rekomendasi ini terdiri dari :

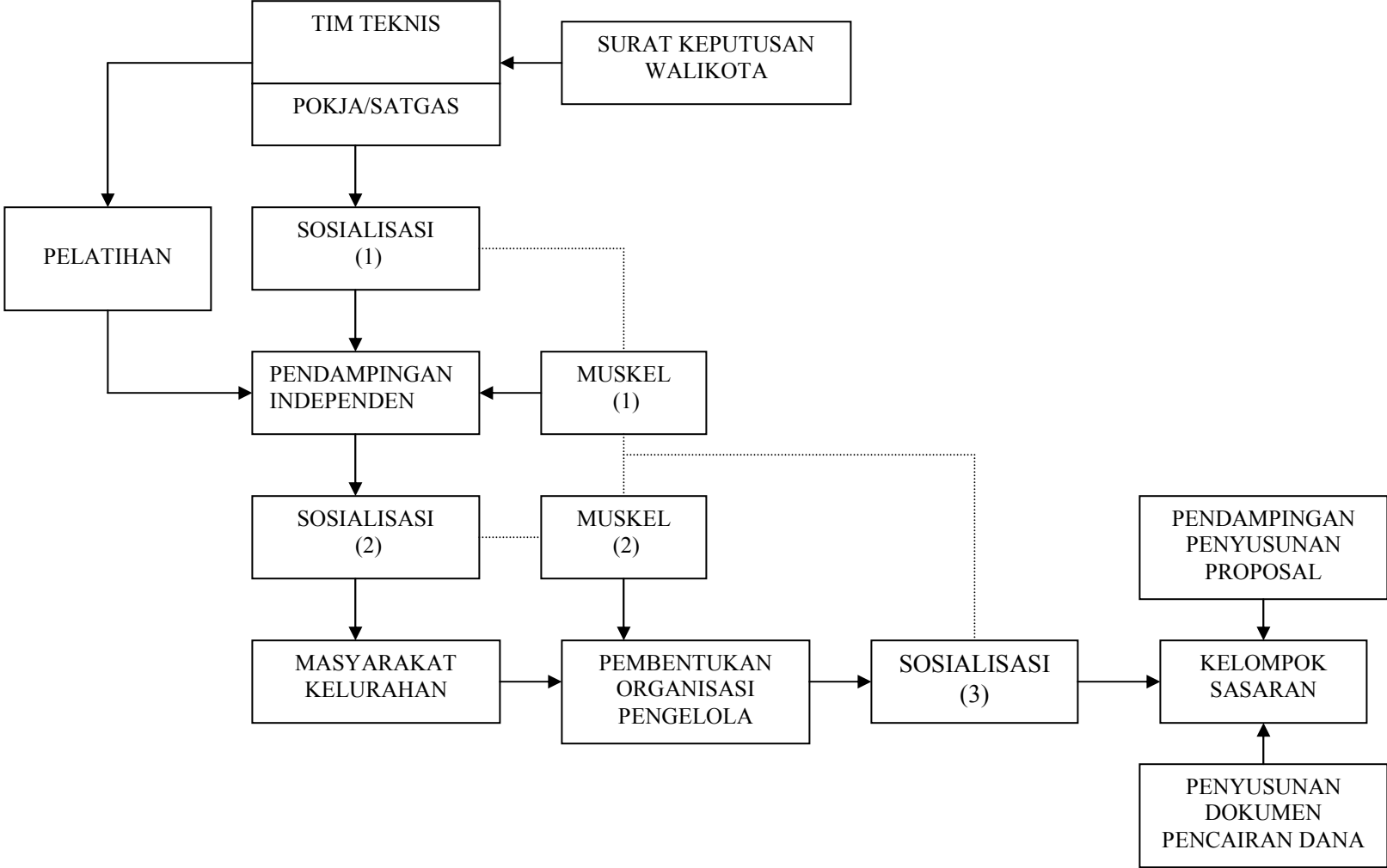
1. Diagram alir model pengembangan dana bergulir di Kota Bandung
2. Alur sosialisasi program dana bergulir
3. Mekanisme perguliran dana
4. Substansi materi pelatihan program dana bergulir di Kota Bandung
5. Proses pelatihan program –program dana bergulir
6. Mekanisme koordinasi unit pengaduan masyarakat (UPM) sebagai lembaga control
7. Pelestarian organisasi pengelola keuangan.

Alur dan mekanisme model-model rekomendasi tersebut dapat dilihat pada halaman berikut :

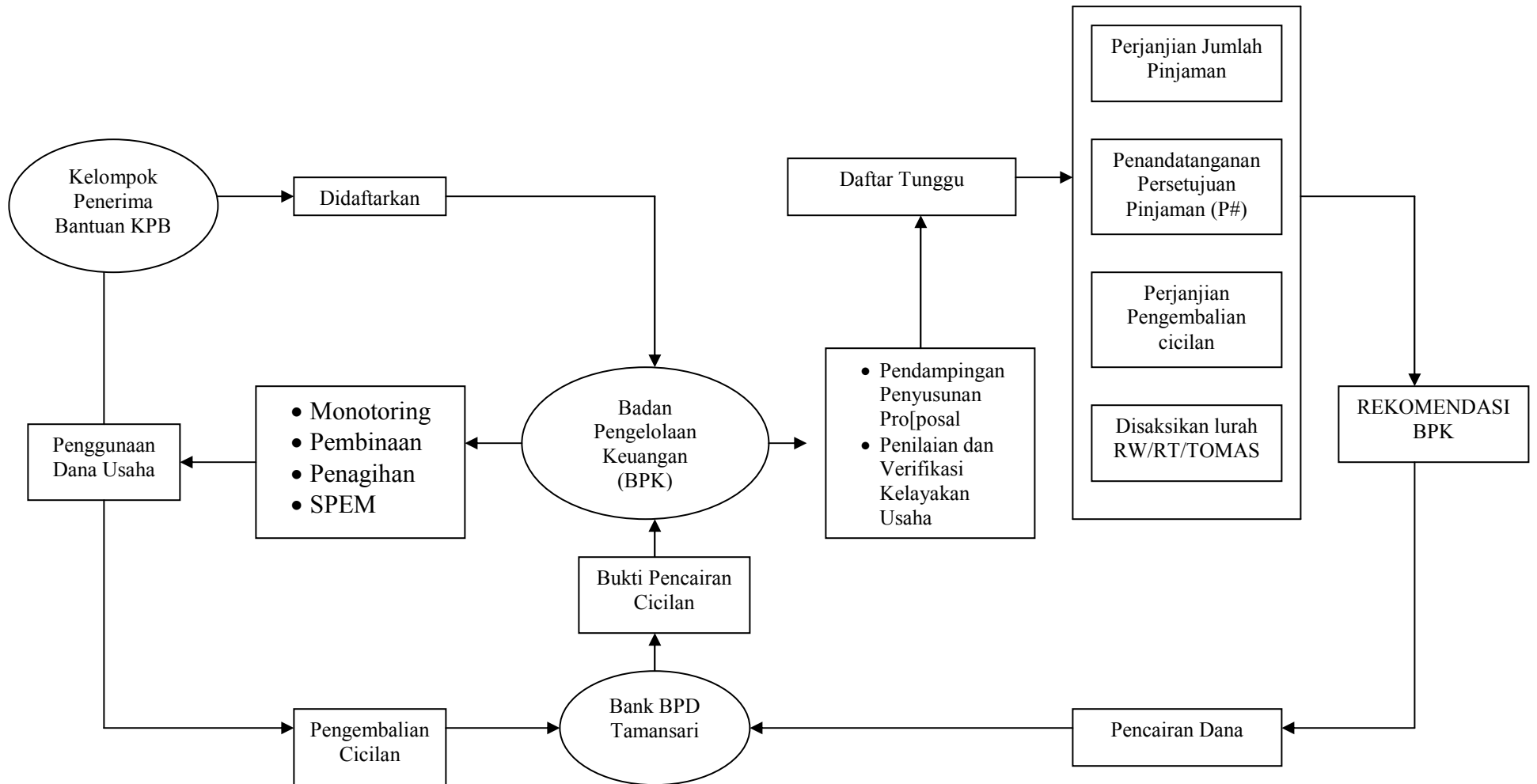
BAGAN 1 : DIAGRAM ALUR MODEL PENGEMBANGAN DANA BERGULIR DI KOTA BANDUNG



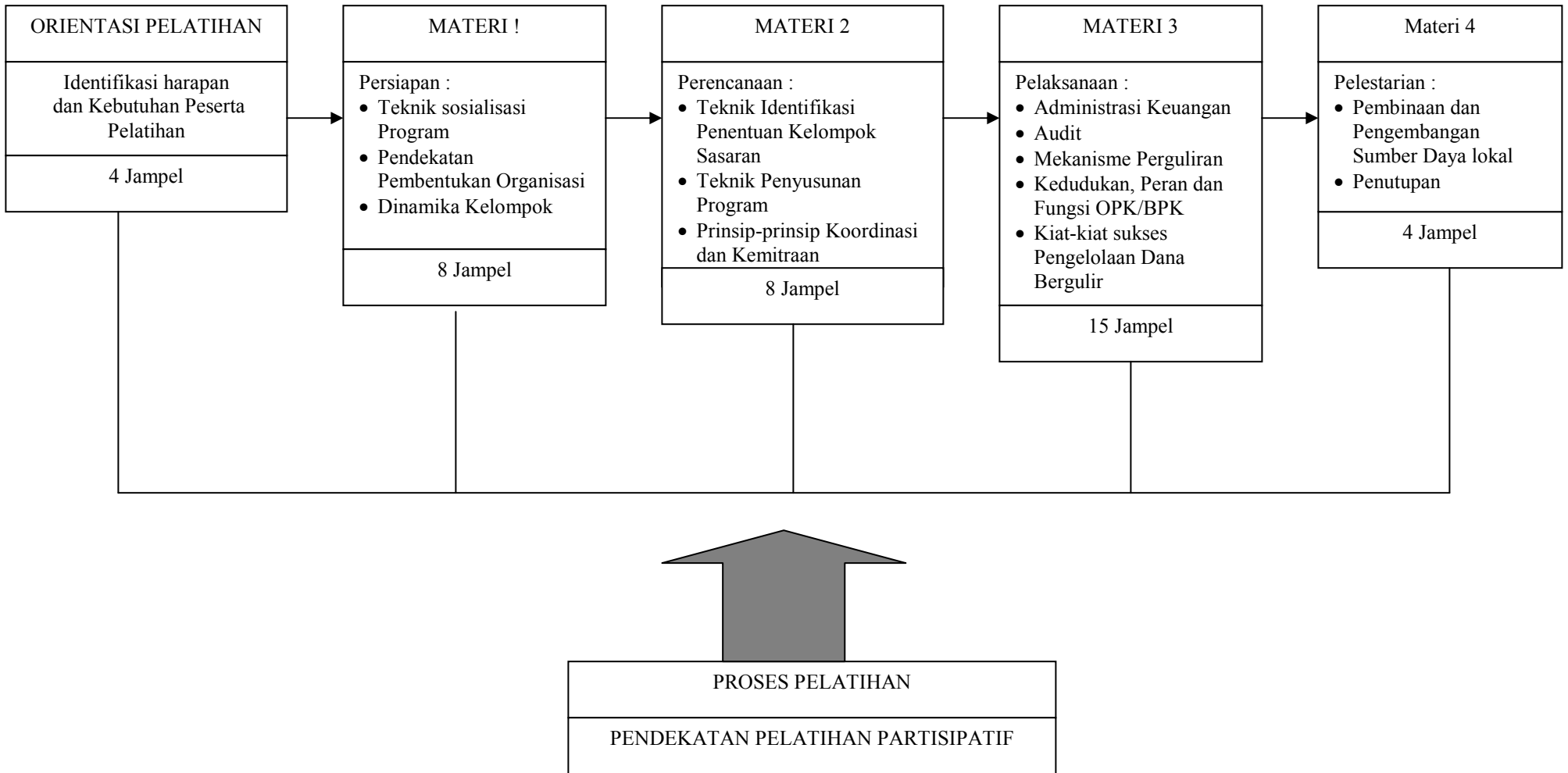
BAGAAN 2 : ALUR SOSIALISASI PROGRAM DANA BERGULIR



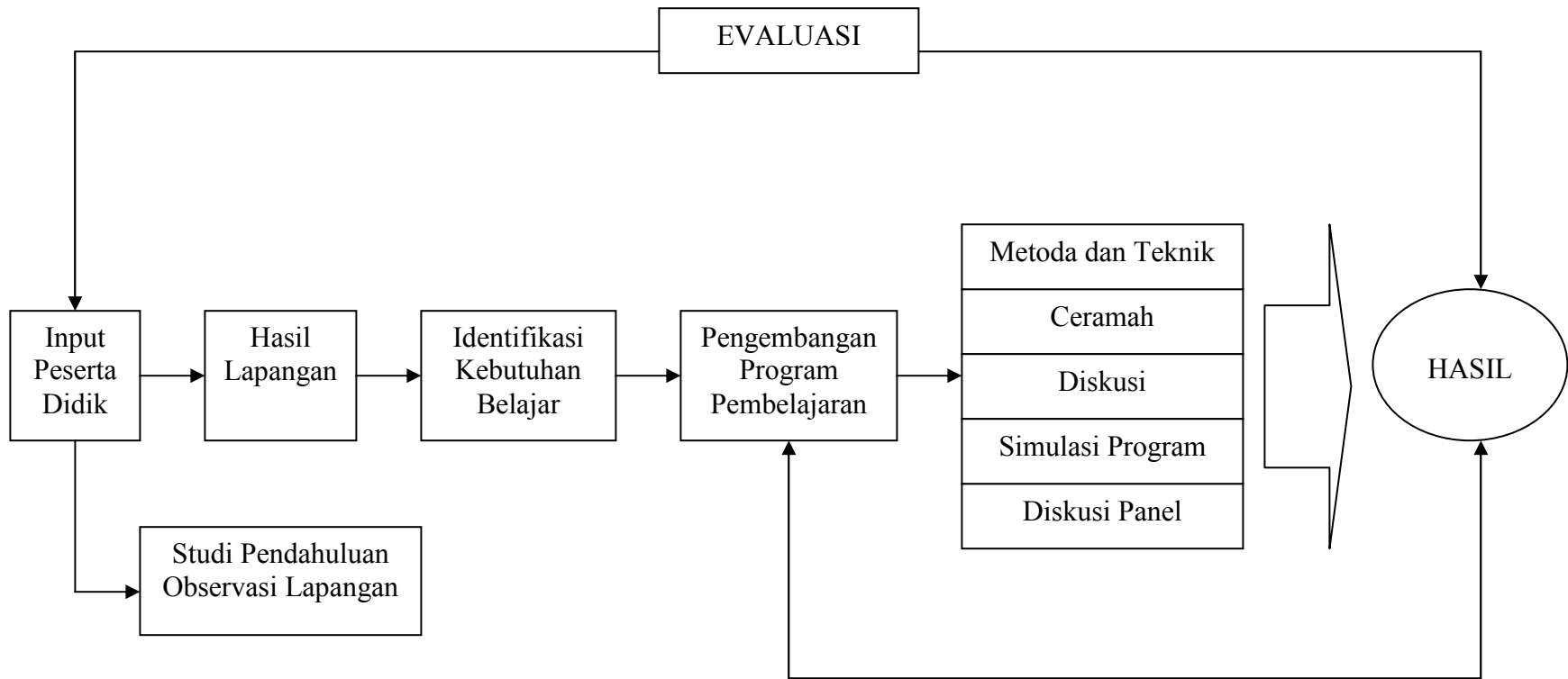
BAGAN 3 : MEKANISME PERGULIRAN DANA



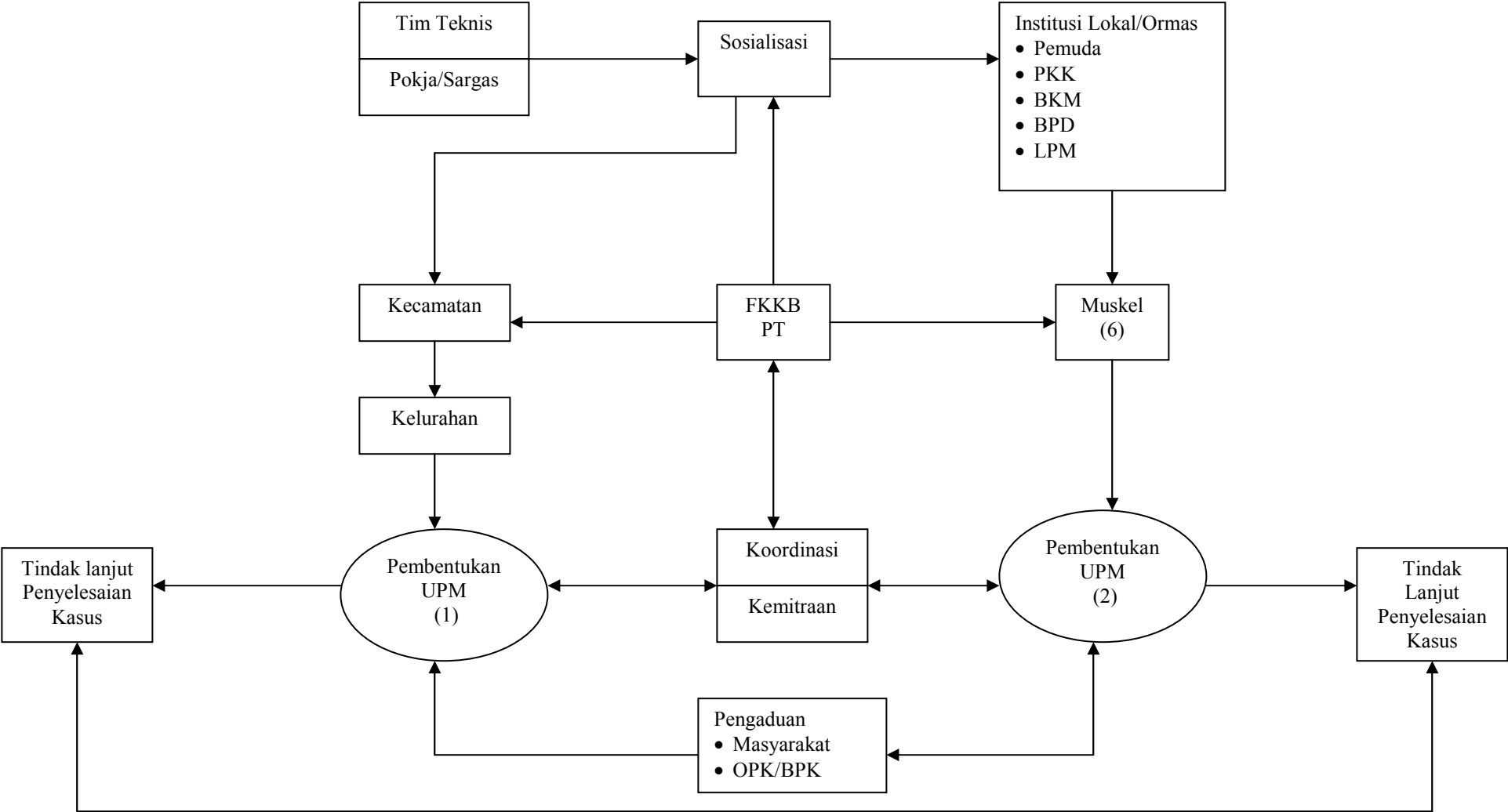
BAGAN 4 : SUBSTANSI MATERI PELATIHAN PROGRAM DANA BERGULIR KOTA BANDUNG



BAGAN 5 : PROSES PELATIHAN PROGRAM DANA BERGU



BAGAN 6 : MEKANISME KOORDINASI UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM) SEBAGAI LEMBAGA KONTROL



BAGAN 7 : PELESTARIAN ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN (OPK/BPK)

